



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SAMARINDA
NOMOR 1031 TAHUN 2022
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;
7. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 040-05/281/HK-KS/IV/2022 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran I (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 10 November 2022

Ketua PPID Utama



Dr. Aji Svarif Hidayattulah, S.Sos, M.Psi
NIP. 197010271999031004

Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor 1031 Tahun 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan November Tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Karangasan Balaikota telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa	- Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai diketahui pemenangnya
2	Proses Inventaris Data Aset Barang Pemeliharaan PJU	Permen PUPR 7 Tahun 2022	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai diketahui pemenangnya
3	Kofigurasi Database dan Aplikasi Serta Username dan Password	Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016	Mengungkap rahasia (database dan aplikasi serta username dan password Dinas)	Melindungi Database dan Aplikasi serta username dan Password Dinas	Tidak Terbatas
4	Proses Penyusunan SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru di Kota Samarinda Tahun 2022	Permen PUPR 14 Tahun 2018	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara yang belum selesai penandatanganan oleh Wali Kota	Masih dalam proses penyusunan dan penandatanganan dokumen oleh Wali Kota Samarinda	Sampai dengan Bulan Desember 2022
5	Dokumen Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni Kota Samarinda	Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2016	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara yang belum selesai penandatanganan oleh Wali Kota	Masih dalam proses penyusunan dan penandatanganan dokumen oleh Wali Kota Samarinda	Sampai dengan Bulan Desember 2024
6	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian a. Skala Besar b. Bukan Skala Besar	PP No. 12 Tahun 2021 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dapat menimbulkan dampak pada Spekulasi Tanah	Melindungi dan menghindari dampak pada Spekulasi Tanah	Tidak Terbatas

7	Penyediaan Rumah Khusus (Penyusunan Rencana)	Kemendagri No. 50 Tahun 2018	Mengganggu kinerja yang lain	Menghindari gangguan dari kinerja yang lain	Tidak Terbatas
8	Laporan Keuangan Dinas yang belum di audit	- Pasal 17 huruf l UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
9	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	- Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas, dan sampai dikatakan telah diaudit dan bersifat final
10	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
11	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah	- Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Tidak Terbatas
12	Informasi tentang program dan/atau kegiatan/sub kegiatan (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai ditetapkan dalam Perda/Perwali
13	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup, meliputi: - Laporan singkat - Catatan Rapat - Risalah - Slide presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengolah surat
14	Dokumen laporan pengaduan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintahan dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
15	Disposisi memorandum dan nota dinas di Lingkungan Pemkot Samarinda yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengolah surat

16	Exercise/perhitungan APBD Pemkot Samarinda (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD, BPKAD, Bappeda)	- Pasal 17 huruf l UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai ditetapkan dalam Perda
17	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
18	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak
19	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
20	Daftar penilaian prestasi kerja/DP3 SKP PNS	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang
21	Database objek pajak dan retribusi	- Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi	Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang
22	Source Code/koding aplikasi dan database wajib pajak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b	Jika dibuka ke publik berarti memberikan informasi kode rahasia yang berpotensi disalahgunakan untuk menimbulkan gangguan terhadap sistem online	Keamanan sistem lebih terjamin	Sampai dengan ada perubahan aplikasi
23	Data Wajib Pajak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset, - UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
24	MOU/SPK yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bisa disalahgunakan	Menjaga objektivitas penilaian	Jika sudah terbit MOU/SPK

25	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman: - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atau hukuman disiplin PNS, dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS - Proses pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan Surat Keputusan
26	Proses Penetapan dan Penangguhan UMP dan UMK	- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan	Menimbulkan permasalahan / polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif	Sampai dengan penetapan dan penangguhan UMP / UMK
27	Biodata Tenaga Kerja Asing	- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - Permenaker No. 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA)	Tidak Terbatas
28	Arsip dinamis, aktif dan interaktif yang berisikan a. Dokumen Keuangan (SPJ berikut lampirannya, dokumen anggaran dan otoritasnya) b. Akte otentik yang bersifat pribadi dan wasiat c. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - UU No.43 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	- Selama masih berlaku - Selama masih berlangsung - Selama perlindungan masih berlaku
29	Data Pribadi Penduduk (No. KK, NIK)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i - UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk
30	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan agama	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	mengganggu proses proses penyidikan dan Penyelidikan	Dapat mengganggu penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (Kejaksaan)
31	Dokumen kepemilikan tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai dengan ada persetujuan tertulis dari pemilik tanah

32	Laporan keuangan tahunan berjalan	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	dapat merugikan proses penyusunan kebijakankarena adanya pengungkapan secara prematur	adanya pengungkapan secara prematur	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
33	Data Izin Usaha Mikro	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengetahui jenis usaha dan pemilik usaha	Melindungi rahasia pribadi dan pemilik usaha menengah	tidak Terbatas dan mendapat izin
34	Surat Salinan Batas Tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset, - UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, - Permen Agrria No 03 Tahun 1997 Ttg Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 Bag. Kesepuluh ttg Penyajian Informasi Data Fisik dan Yuridis	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia pribadi dan pemilik usaha menengah	tidak Terbatas dan mendapat izin hanya kepada pemegang hak yg dpt diberikan salinan batasnya
35	Kode Password Aplikasi	Pasal 17 huruf c UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, UU ITE o 11 Tahun 2008	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/Penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	tidak Terbatas dan mendapat izin
36	IP Address.Akses FTP, Kode Password User Aplikasi	Pasal 17 huruf c UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 30 UU ITE o 11 Tahun 2008	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/Penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	tidak Terbatas dan mendapat izin
37	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 huruf l UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, Psl 44 ayat 1 dan 2 UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Bendahara Negara UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan informasi yang salah dikarenakan laporan keuangan yang belum final dan belum diaudit	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
38	Data Pribadi Penduduk (No. KK, NIK)	Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 84 ayat 1 dan 2 psl 86 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Adminsitrasi Kependudukan	Dapat mengungkap informasi pribadi	Dapat mengungkap informasi pribadi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan

39	Dokumen sandi yang bersifat rahasia, fax, email	Pasal 17 huruf c UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 34 UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang di sepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi dokumen.	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
40	laporan hasil LHP	Pasal 17 huruf a UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, Peraturan BPK No.1 Tahun 2007	Dapat mengganggu Proses Penyelidikan dan Penyidikan	Mengganggu penegakan hukum	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
41	Data Piutang, Gaji dan Tunjangan	Pasal 17 huruf c UU No.14 tahun 2008 tentang KIP,psl 84 ayat 1 dan 2 psl 86 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Admistrasi Kependudukan	Dapat mengungkap informasi pribadi	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
42	Laporan Pelaksanaan Anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - UU No.43 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang di sepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka menurut UU
43	Informasi tentang pertanahan yang menyangkut data kepemilikan aset seseorang	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset, - UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Permen Agrria No 03 Tahun 1997 Ttg Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 Bag. Kesepuluh ttg Penyajian Informasi Data Fisik dan Yuridis	Ada kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak lain dan bisa berakibat sengketa	Melindungi rahasia pribadi dan pemilik usaha menengah	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
44	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Data Dokumen yang sifatnya melanggar Pasal 17 KIP dan peraturan lainnya	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang di sepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
45	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan		
46	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan

47	Proposal penelitian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset - UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, atau ketentuan lain yang menyangkut sifat penelitiannya	Dapat merugikan proses penelitian adanya pengungkapan secara prematur	Tertutup sebelum hasil penelitiannya belum dipublikasikan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
48	Dokumen ijin dan perkawinan dan perceraian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset, - UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, atau ketentuan lain yang menyangkut sifat penelitiannya	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
49	Dokumen/arsip riwayat studi mahasiswa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset, - UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, atau ketentuan lain yang menyangkut sifat penelitiannya	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
50	Evaluasi organisasi dan tata kerja	- UU no 39 Thn 2008 Tentang Kementrian Negara, PP No. 8 Tahun 2006 Ttg Pelaporan dan Kinerja Instansi, - Perpres No 29 Thn 2014 ttg Sisitem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Permen PAN No. 88 Thn 2021 Ttg Evaluasi dan Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen yang dpt menimbulkan analisa penilaian akuntabilitas kinerja yang salah dan menghambat langkah antisipatif dari pemecahan masalah	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
51	Proses penyelesaian sengketa/konflik	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)
52	Data aset ijin mendirikan bangunan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
53	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi	

54	Data Buku Register Ahli Waris	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset - UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, atau ketentuan lain yang menyangkut sifat penelitiannya	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
55	Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia, Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia, Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i. - UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang di sepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan KI atau pengadilan	
56	SK Pensiun	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
57	Karis, Karsu, Karpeg	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul atau instansi pengelola kepegawaian	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan

Menyetujui,
Ketua PPID Utama



Dw. Aji Syarif Hidayattullah, S.Sos. M.Psi
NIP. 197010271999031004